

**BERISLAM DAN BERNEGARA BAGI MUSLIM DI PATANI
PERSPEKTIF POLITIK PROPETIK**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MR. NIARIPEN WAYEEKAO

NIM: 12370039

PEMBIMBING:

**DRS. H. OMAN FATHUROHMAN SW., M.AG.
NIP.19570302 198503 1 002**

SIYASAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2016

ABSTRAK

Negara Thailand merupakan Negara yang berbentuk kesatuan dengan mayoritas penduduk beragama Budha dan hanya sedikit yang beragama Islam. Masyarakat muslim Thailand terkonsentrasi di wilayah Thailand selatan di antaranya Patani, Narathiwat dan Yala, Muslim melayu di Thailand Selatan memiliki perbedaan yang mencolok secara sosio-kultural dibandingkan dengan penduduk mayoritas Negara Thailand yaitu Budha. Sejarah Perkembangan politik Thailand selatan tidak terlepas dari sejarah konflik yang berkepanjangan, Salah satu isu yang dibangun dari konflik tersebut tidak lain adalah isu rasialisme. Implikasi dari masalah ini ketidakadilan terhadap minoritas yang berada di Thailand. Sampai saat ini kebijakan pemerintah terhadap minoritas masih berlangsung dan belum menemukan titik temu perdamaian. Dari kompleksitas politik tersebut, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah ; pertama, bagaimanakah Perkembangan Politik di Thailand Selatan, dan kedua, Bagaimanakah kebijakan pemerintah Thailand terhadap minoritas muslim warga Patani.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) menggunakan metode deskriptif-analisis dengan pendekatan politik Islam. Pendekatan ini melihat perkembangan politik dalam masyarakat Patani serta memahami berbagai fenomena-fenomena yang berimplikasi pada terjadinya perubahan dalam struktur kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori politik propetik M.nur. Teori ini menjelaskan bahwa merumuskan tiga nilai dasar sebagai pijakan profetik, yaitu; humanisasi, liberasi dan transendensi.

Penelitian ini menemukan bahwa perkebangannya politik Thailand Selatan Tahun 1930-1950, tahun 1950-1980an, tahun 1990-terakhir. Dari kompleksitas perkembangan politik tersebut, pemerintah Thailand melakukan kebijakan terhadap umat Islam dan Perkembangan Kotemporier Muslim Patani

Kata kunci : Thailand Selatan, Politik, Muslim Patani



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mr. Niaripen Wyeekao
NIM : 12370039
Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya adalah benar asli adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam penelitian ini dan dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dan dapat dipergunaankan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

Yogyakarta, 8 Agustuh 2016



Penyusun

Mr. Niaripen Wyeekao

NIM. 12370039



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : 3 Eksemplar

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mr. Niaripen Wayeekao

NIM : 12370039

Judul : BERISLAM DAN BERNEGARA BAGI MUSLIM DI PATANI
PERSPEKTIF POLITIK PROPETIK

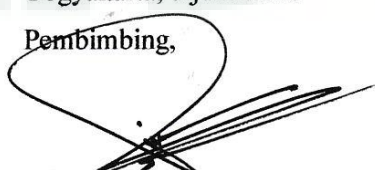
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 juni 2016

Pembimbing,


DRS. H. Oman Fathurohman Sw., M.Ag.
NIP.19570302 198503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-528/Un.02/DS/PP.00.9/11/2016

Tugas Akhir dengan : BERISLAM DAN BERNEGARA BAGI MUSLIM DI PATANI
PERSPEKTIF POLITIK PROPETIK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MR. NIARIPEN WAYEEKAO
Nomor Induk Mahasiswa : 12370039
Telah diujikan pada : Kamis, 24 November 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. H. Oman Fathurohman SW., M. Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji I

Dr. Ocktoberri Syah, M. Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II

Dr. Ahmad Pattiroy, M. Ag.
NIP. 19620327 199203 1 001

Yogyakarta, 24 November 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agun Moh. Najib, M. Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

HurufArab	Nama	HurufLatin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis “h”

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الولايا	Ditulis	<i>Karāmahal-auliya‘</i>
---------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta‘mar butah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	Fathah	ditulis	A
-----	Kasrah	ditulis	I
-----	Dammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

أ	Fathah diikuti Alif Tak berharkat	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
ي	Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah)	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
ري	Kasrah diikuti Ya' Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
و	Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

يَ	Fathah diikuti Ya' Mati	ditulis	<i>Ai</i>
وَ	Fathah diikuti Wawu Mati	ditulis	<i>Au</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawīl-furūd</i> atau <i>al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahlussunnah</i> atau <i>ahlas-sunnah</i>

MOTTO

Landasan Motivasi :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ.

*“Sesungguhnya Tuhan tidak mengubah sesuatu nasib kaum bangsa
Melainkan kaum bangsa itu mengubah nasib mereka sendiri”*

(QS.Ar-Ra’d, ayat :11)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Persembahan untuk:

- *Kepada kedua orang tuaku ayahanda dan ibunda sangat tercinta,
Yang tidak kenal lelah dalam mendidik hingga dewasa,
Atas kasih sayang dengan mencintaiku.
Terima kasih atas doa dan motivasi
dalam memperjuangkan hidupku kesabaran yang tiada berhenti.*
- *Kepada adik-adikku sedarah,
Yang mendoankan, dukungan dan kasih sayang.*
- *Kepada isteriku yang tercinta.*
- *Kepada para guru yang telah
Mendidik dan mengajarkanku
segala ilmu yang dikorbankan tidak lupa jasmu.*
- *Kepada teman-teman senasib,
dikampungku, pondok kecil, kota Serambi Mekah.*
- *Kepada teman-teman sebangsa dan tanah air
PMIPTI Yogyakarta*
- *Kepada teman-teman sekelas JS 2012 dan teman KKN.
Almamaterku Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN sunan kalijaga Yogyakarta*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي انعمنا بنعمة الايمان والاسلام. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد و على اله واصحابه اجمعين.

اما بعد.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“BERISLAM DAN BERNEGARA BAGI MUSLIM DI PATANI PERSPETIF POLITIK PROPETIK”**. Shalawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafa’atnya kelak di hari kiamat.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, teriring doa dan ucapan syukur penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Oman Fathurohman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Siyasa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Drs. Oman Fathurohman, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan masukan dan bimbingan arahnya terhadap skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen beserta civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama kepada segenap keluarga besar Jurusan Siyasah.
6. Kedua orang tua tercinta yang telah berjuang dengan sabar dan tanpa lelah mendukung penulis untuk menggapai cita-cita. Serta kakak dan adikku tercinta.
7. Teman-teman senasib seperjuangan di Jurusan Siyasah angkatan 2012 yang senantiasa memberikan semangat dan memberikan warna kehidupan baru selama perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Keluarga besar Organisasi PMIPTI keluarga selama di Yogyakarta, yang senantiasa memberikan semangat spiritual sampai saat ini.
9. Seluruh keluargaku di PMIPTI Yogyakarta baik yang masih ada maupun yang sudah alumni.yang telah memberikan banyak sekali pembelajaran hidup selama ini dan memberikan makna penting kebersamaan dan kekeluargaan yang tak akan terlupakan.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan, terutama yang pernah terlebiat secara langsung dalam proses penyusunan skripsi ini: Mr.Ilahm Noreng dan yang lainnya yang tak bisa disebutkan semuanya. Kalian punya kontribusi besar dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa karya yang penulis hasilkan dari penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Keterbatasan waktu, jarak, kemampuan dan tenaga di dalam membuat skripsi ini masih begitu banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini sangat penulis butuhkan guna memperbaiki berbagai kekurangan yang belum penulis sempurnakan.

Penulis berharap akan ada peneliti yang tertarik dan berminat menyempurnakan penelitian ini dari berbagai sudut pandang apapun. Hal ini sangat penting untuk dijadikan *ibrah* bagi setiap orang, negara bahkan dunia yang hendak membawa perubahan pada arah yang jauh lebih maju dan berperadaban.

Yogyakarta, 10 November 2016 M

Mr. Niaripen Wayeekao
NIM. 12370039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB.....	vi
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika pembahasan	18
BAB II KONSEP POLITIK PROPHETIK YANG MEMBAHAS TENTANG HUMANISASI, LIBERASI DAN TRANSENDENSI	
A. GAGASAN POLITIK PROPETIK	20
1. Humanisasi.....	22
2. Liberasi.....	24
3. Transendensi	25

BAB III KEADAAN UMAT ISLAM DI THAILAND SELATAN

A. Letak Geografi Patani	28
B. Kondisi Demografi Masyarakat Patani	30
C. Sejarah Singkat Patani di Thailand Selatan.....	33
D. Kondisi Masyarakat Muslim Patani di Thailand Selatan.....	40
E. Sistem Sosial Orang Melayu Patani	46
1. Sistem Keagamaan	46
2. Sistem Kebudayaan	49
3. Sistem Pendidikan.....	55
4. Sistem Politik	60
5. Sistem Ekonomi	63

BAB IV ANALISIS PERKEMBANGAN POLITIK DALAM MASYARAKAT MUSLIM THAILAND SELATAN

A. Perkembangan Politik	68
1. Setting Politik Thailand Selatan Tahun 1785-1950	68
2. Setting Politik di Thailand Selatan tahun 1950-1980an.....	78
3. Setting Politik Thailand Selatan tahun 1990-an.....	81
4. Perkembangan Politik Thailand Selatan tahun Terakhir.....	82
B. Kebijakan Pemerintah Thailand terhadap minoritas muslim Patani	86
1. Kebijakan Pemerintah Terhadap Muslim Patani.....	86
2. Kebijakan Pemerintah Thailand Terhadap Perkembangan Kontemporer Muslim Patani	92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA	101
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Terjemah.....	I
2. Daftar Pertanyaan Wawancara	II
3. Transkrip Hasil Wawancara	III
4. Curriculum Vitsae.....	VIII
5. Surat Rekomendasi Ijin Penelitian	IX
6. Surat Permohonan ijin Penelitian	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Thailand merupakan salah satu negara di antara negara-negara di kawasan Asia tenggara. Secara geografis, kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan antara benua Australia dan daratan China, daratan India sampai laut China. Mayoritas penduduk Thailand beragama Budha, sedikit yang beragama Islam dan Konghucu. Umat Islam di Thailand merupakan minoritas yang berkembang cepat dan merupakan minoritas terbesar setelah China. Seperti halnya kaum minoritas di negara-negara yang lain, kawasan Thailand bagian selatan yang merupakan basis masyarakat Melayu-Muslim adalah daerah konflik agama. Selain itu terjadi persengketaan wilayah dengan latar belakang ras dan agama yang berkepanjangan.

Negara Thailand terdiri dari 77 provinsi dengan jumlah penduduk 67 juta jiwa. Patani menjadi salah satu dari lima wilayah di Thailand selatan selain, Yala, Narathiwat, Satun (Setul) dan Songkhla, Mayoritas dihuni oleh umat Islam. Jumlah penduduk Muslim di Thailand sekitar 15 persen dibandingkan penganut Budha yang 80 persen. Mayoritas muslim tinggal di Selatan Thailand sekitar 1,673,900 juta jiwa, atau 80 persen dari total penduduk khususnya di provinsi Patani, Yala, Naruthiwat, tiga provinsi yang sangat mewarnai dinamika di

Thailand Selatan. Tradisi Muslim di wilayah ini menguasai wilayah Asia Tenggara, termasuk Thailand selatan.¹

Negeri Patani mempunyai sejarah yang cukup lama, jauh lebih lama dari negeri-negeri di semenanjung Melayu seperti Malaka, Johor dan Selangor². Sejarah lama Patani merujuk kepada kerajaan Melayu Tua pengaruh Hindu-India bernama Langkasuka.

Kawasan timur Langkasuka meliputi daerah pantai timur semenanjung, mulai dari Senggora, Patani, Kelantan sampai ,Terengganu, termasuk juga kawasan utara negeri Kedah. Menurut catatan sejarah, Langkasuka itu terletak di daerah Patani sekarang, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ahli antropologi di Prince of Songkla University, yang dikuatkan juga oleh sejarawan lain seperti Prof. Zainal Abidin Wahid, Mubin Shepard, Prof. Hall dan Prof. Wheatly. Tapi, persoalan berubahnya nama Langkasuka menjadi Patani masih belum diketahui dengan pasti karena tidak ada catatan sejarah yang jelas mengenai hal itu. Mengikut hikayat Patani pula, kerajaan Patani berasal dari kerajaan Melayu yang berpusat di pedalaman dan sukar untuk didatangi oleh pedagang-pedagang. Sehingga raja Patani ketika itu memindahkan pusat kerajaanya ke sebuah perkampungan nelayan yang akhirnya di beri nama "Patani".

Karena letaknya yang strategis dari segi geografis, Patani menjadi tumpuan para pedagang dari timur maupun barat, untuk singgah di sana sambil beristirahat ataupun berdagang. Sehingga Patani menjadi pusat perdagangan ketika itu.

¹ Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 231.

² <http://pmi-sumedang.blogspot.co.id/2012/02/sedikit-sejarah-pattani.html>.

Menurut ahli Antropologi, orang Patani berasal dari suku Jawa-Melayu. Karena suku inilah yang pertama kali mendiami tanah Melayu. Kemudian berdatangan pedagang Arab dan India ke daerah Patani. Masuknya Islam ke Patani bukan dengan perang atau penaklukan, tapi melalui jalur dagang. Baik itu Indonesia, Malaysia, begitu juga Patani (Thailand). Namun, kapan masuknya Islam ke Patani tidak diketahui secara pasti. Tetapi, kalau melihat karya sastra sejarah dan merujuk kepada para sejarawan, maka dapat diperkirakan bahwa Patani menjadi negeri Islam pada tahun 1457 M.

Masuknya Islam ke Patani, juga seperti sebuah cerita khayalan atau dongeng. Tapi memang begitulah proses masuknya Islam kesana. Sebagaimana dikisahkan dalam buku-buku sejarah. Dikisahkan waktu itu, Patani dipimpin oleh seorang raja yang bernama Phya Tu Nakpa. Raja dikabarkan menderita sakit dan tidak kunjung sembuh. Dia mendengar, Bahwa ada seorang bisa mengobati sakit raja dengan syarat raja harus masuk Islam setelah sembuh dari sakitnya. Raja menyetujui syarat sang tabib dan berjanji untuk masuk Islam setelah sembuh.

Lalu sang tabib pun mengobati raja. Tetapi, setelah sembuh sang raja mengingkari janjinya. Dia tetap saja memeluk agamanya. Kemudian raja sakit kembali dan diobati kembali. Kejadian itu terulang sampai tiga kali. Pada yang ketiga kalinya raja menyerah dan insaf. Setelah sembuh dari sakitnya, raja bersama keluarga dan pembesar istana memeluk Islam. Pada akhirnya, raja pun mengganti namanya menjadi Sultan Ismail Shah. yang bisa mengobati sakitnya. Sejak itulah Islam mulai berkembang di Patani dan ajaran Budha mulai ditinggalkan yang pada akhirnya hilang dari Patani. Islam berkembang dengan

pesat di Patani tersebut. Dahulunya, Patani bukanlah bagian dari Thailand (Siam), melainkan daerah Islam yang berkembang dan maju di Selatan Siam. Sepeninggalnya, raja digantikan oleh putranya, Sultan Muzaffar Shah. Dia meneruskan dan memajukan negerinya. Tidak hanya itu, Sultan Muzaffar Shah juga melakukan lawatan ke negara tetangga, termasuk Siam. Tapi lawatan Sultan Muzaffar tidak di terima baik oleh Raja Siam. Karena kesombongan Raja Siam, yang menganggap dirinya lebih terhormat, membuat Sultan Patani marah dan merasa direndahkan. Sehingga dia dan adiknya mengerahkan pasukan dan menyerang Siam yang ketika itu sedang diserang oleh Burma. Akhirnya, Siam jatuh ketangan Sultan Muzaffar saat itu juga. Tak lama kemudian, Raja Patani meninggal dan digantikan oleh adiknya. Sepeninggal adiknya, tahta diturunkan kepada putra Sultan Ismail Shah, yang menimbulkan masalah pada kesultanan. Mulailah terjadi perpecahan di dalam istana yang melibatkan keluarga raja juga putera-putera selir beliau.

Puncak keemasan dan runtuhnya Patani mencapai puncak keemasannya dizaman empat ratu yaitu; Ratu Hijau (1584-1616), Ratu Biru (1616-1624), Ratu Ungu (1624-1635), dan Ratu Kuning (1635-1651). Pada masa ratu-ratu tersebut, Patani sangat makmur dan kaya raya. Kekuasaannya pun meluas sehingga terkenal dengan sebutan Negeri Patani Besar. Kejayaan ini berlangsung selama 67 tahun. Ketika Ratu Kuning meninggal pada 1651, kejayaan Patani berkurang dan terjadi kemerosotan secara politik, ekonomi dan militer. Negeri Patani Besar meliputi; Kelantan, Terengganu, Patani Awal, Senggora dan Pethalung, yang tadinya bersatu mulai memisahkan diri. Bersamaan dengan kemerosotan ini, Siam

bangkit dan berhasil mengusir Burma dari seluruh negeri. Patani ditaklukkan oleh Siam pada tahun 1785. Sejak saat itulah patani berada di bawah pemerintahan Siam. Pada tahun 1909, Patani resmi menjadi bagian dari Siam, yang kemudian mengganti nama dengan Thailand sampai saat ini.

Setelah Patani jatuh kepada tangan siam (Thailand) maka muncul beberapa masalah di Patani seperti konflik yang terjadi di Thailand Selatan ini merupakan konflik yang sudah terjadi sejak abad ke-19 ('Krisis Paknam')³, dan setelah adanya pembagian batas wilayah Thailand Selatan (Patani, Yala, Narathivat dan Satun) yang menjadi kekuasaan kerajaan Thai yang disetujui oleh Inggris. Kawasan Patani, Yala, dan Narathiwat, secara budaya masyarakat di wilayah ini merupakan masyarakat melayu dan sangat berbeda dengan Thailand (Siam), di provinsi ini Islam berkembang dengan sangat pesat (karena masih memiliki ikatan darah dengan etnis Melayu) karena provinsi yang masih serumpun, dan berbeda dengan Thailand yang mayoritas beragama Budha. Sekitar tahun 1930-an, terjadi perubahan sistem pemerintahan di Thailand, di mana sistem monarki absolut berganti menjadi sistem monarki parlementer, di mana parlemen didominasi oleh orang-orang dari kalangan militer. Pergantian sistem pemerintahan tersebut lantas diikuti dengan semakin radikalnya kebijakan pemerintah pusat Thailand terhadap provinsi-provinsi di Thailand selatan.

Diskriminasi penguasa Thailand semakin terlihat setelah munculnya peraturan-peraturan lokal, masyarakat Thailand Selatan yang berbasiskan Islam harus dihapuskan & masyarakat Thailand selatan diharuskan memakai aksara

³ Aphornsuvan, thanet. 2004. Origins of Malay Muslim "Separatism" in Southern Thailand. Asian Research Institute: University of Singapore. Chalk, Peter. The Malay-Muslim Insurgency in Southern Thailand.

serta bahasa Thai, menggantikan bahasa Melayu yang selama ini mereka pakai. Puncaknya rasa tidak suka masyarakat lokal kepada pemerintah pusat, akhirnya berujung pada munculnya kelompok-kelompok bersenjata yang anti pemerintah pusat,.

Konflik yang terjadi di Thailand selatan ini kerap dipandang sebagai konflik antar agama semata antara muslim Melayu di Thailand selatan melawan orang Thai (Buddha) yang mendominasi pemerintahan pusat Thailand. Namun jika kaji lebih mendalam, ada begitu banyak faktor yang menyebabkan konflik ini timbul selain faktor perbedaan agama, faktor-faktor seperti kesenjangan sosial, politik dan tindakan kasar aparat keamanan, diskriminasi rasial, serta faktor ekonomi yang tidak begitu diperhatikan oleh pemerintah Thailand pusat. Pada tahun 1960 sebuah organisasi bersenjata yang bernama Barisan Revolusi Nasional (BRN), yang dipelopori Ustad Haji Abdul Karim Hassan melakukan pemberontakan dimana-mana, organisasi ini berideologi Islam,

Dalam pergerakannya, selain melalui angkat senjata organisasi ini juga melakukan kegiatan sosial untuk meningkatkan taraf pendidikan & kesejahteraan para penduduk, sehingga menarik perhatian masyarakat Patani untuk bergabung,

Namun pada tahun 2001, Badan Otonomi khusus itu dihapuskan dari wilayah Thailand Selatan, sehingga pada akhir tahun 2001 pemberontakan besar kembali terjadi dan munculnya kelompok bersenjata yang identitasnya tidak diketahui mengakibatkan 5 anggota polisi dan seorang relawan keamanan desa tewas. Tahun demi tahun pemberontakan dan penyerangan di Thailand selatan terus mengalami peningkatan dari sekitar 75 kasus di tahun 2002, meningkat

menjadi 119 kasus di tahun 2003. Pada tanggal 28 April 2004, sekitar 100 orang anggota milisi menyerang 10 pos militer di Thailand selatan. Serangan tersebut berhasil dipatahkan dan sebagian dari milisi tersebut kemudian bersembunyi di Masjid Krue Se, sebuah masjid yang sangat disakralkan oleh penduduk muslim lokal. Para tentara yang mengejar milisi kemudian menembaki masjid & menewaskan milisi-milisi yang bersembunyi di dalamnya. Peristiwa tersebut spontan memunculkan kemarahan para penduduk muslim lokal, dan sejak saat itulah perjuangan-perjuangan yang terjadi di Thailand Selatan mulai dikaitkan dengan agama Islam garis keras dan munculnya *Jihad*.

Sejak awal tahun 2005, organisasi-organisasi pergerakan yang berideologi Islam mulai terbentuk, misalnya Gerakan Mujahidin Islam Patani (GMIP) dan Barisan Islam Pembebasan Patani (BIPP). Selain kelompok-kelompok baru tersebut, para "pemain lama" seperti PULO & BRN juga muncul kembali. Jumlah anggota pemberontak pada fase ini meningkat tajam, jika dibandingkan dengan konflik pada fase-fase sebelumnya yang hanya melibatkan ratusan orang. Sejumlah pemberitaan menyebutkan bahwa, jumlah orang yang terlibat dalam aksi-aksi penyerangan & vandalisme pada waktu itu mencapai 30.000 orang. Para militan ini, selain melakukan aktivitas pemboman, juga sering melakukan aksi-aksi penembakan & pemotongan kepala kepada orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka, termasuk kepada para pemuka agama setempat. Bahkan setelah berakhirnya rezim Thaksin Shinawatra, yaitu pada bulan Agustus 2006 pemberontak meledakkan 22 bank di kota Yala, selain itu kasus baru-baru ini tepatnya pada tanggal 9 Februari 2012, sebuah bom truk meledak di Thailand

selatan dan mengakibatkan sekurang-kurangnya 1 orang tewas, dan tanggal 31 Maret 2012 kembali menimbulkan korban di Yala sebanyak 3 orang. Korban tewas akibat konflik yang terjadi dari tahun 2004-2012 ini lebih dari 5000 jiwa.

Hingga saat ini pemerintah Thailand sebenarnya telah mengambil berbagai tindakan tegas dalam mengatasi pemberontakan di wilayah Thailand Selatan ini, diantaranya dengan adanya kerjasama militer dengan Amerika Serikat, China, Malaysia dan negara-negara lain dalam menangani konflik berkepanjangan yang terjadi di kawasan Thailand Selatan ini. Namun sampai saat ini konflik masih belum juga dapat diatasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka, pokok masalah pada penelitian terhadap kehidupan masyarakat Muslim Patani, Baik dalam bidang Agama, etnis, Sosial, maupun politik.

1. Bagaimanakah Perkembangan Politik di Thailand Selatan pada tahun 1785 - Sekarang ?
2. Bagaimanakah kebijakan pemerintah Thailand terhadap minoritas muslim warga patani?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk menjelaskan kebijakan pemerintah Thailand terhadap warga minoritas muslim di Patani.

2. Untuk menjelaskan tentang perkembangan sosial dan politik Islam di masyarakat Patani.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. teoritis: untuk menjadi bahan rujukan dan data dokumentasi tentang Perkembangan politik politik patani dan sumbangannya pada masyarakat patani Thailand Selatan.
2. Untuk memberikan pemahaman baru pada masyarakat tentang perkembangan politik dan supaya mereka mengambil kesempatan yang menjadi acuan umat islam patani telah menderita dan perhatian umat islam patani Thailand Selatan.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran penulis, belum ada karya ilmiah yang secara spesifik membahas tentang Berislam dan Bernegara bagi Muslim Patani dalam perspektif politik propetik sejauh pengetahuan penulis belum ada penelitian yang membahasnya. Akan tetapi ada beberapa karya tulis yang membahas topik yang berhubungan dengan judul tersebut, diantaranya :

Ada skripsi yang disusun oleh Egi prayogi yang berjudul “*Sistem Pemilihan kepala Daerah perspektif Fiqih Siyasah (Studi Pasal 24 Undang-undang No 32 Tahun 2004)*. Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-normatif* dan bersifat *deskriptif-analitis*. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dari segi substansinya sudah sesuai dengan

fiqih siyasah meskipun secara teknis masih terdapat perbedaan, kerana harus disesuaikan dengan kondisi sosial yang ada demi tercapainya kemaslahatan umat.⁴

Islam di Mungthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani, merupakan buku yang ditulis oleh Surin Pitsuwan. Buku ini membahas tentang sejarah masyarakat Melayu-Patani dan kebijakan pemerintah Thailand terhadap etnik Melayu-Patani dan juga membahas tentang perlawanan masyarakat Melayu-Patani terhadap kebijakan pemerintah pusat Thailand.

“Umat Islam Patani Sejarah dan Politik”, merupakan buku yang ditulis oleh Mohd Zamberi A.Malik. buku ini membahas tentang gambaran umum tentang Patani seperti sejarah kedudukan awal orang melayu, pembukaan Negara Patani, Patani dibawah naungan Siam (Thailand), kebijakan-kebijakan Siam upaya untuk menguasai Patani, gambaran umum tentang perjanjian Anglo-Siam dengan Inggris dan lahirnya gerakan bersenjata melawan pemerintah pusat Thailand. Dalam buku hanya memberi gambaran umum tentang perjanjian Anglo-Siam tidak secara rinci.

“Politik dan Perjuangan Masyarakat Islam di selatan Thailand tahun 1902-2002”, merupakan buku yang ditulis oleh Ahmad Umar Capakiya. buku ini menggunakan bahasa *Jawi*,⁵ dan dalam buku ini membahas mengenai gambaran

⁴ Egi Prayogi “Sistem pemilihan kepala Daerah Perspektif Fiqih Siyasah (*Studi Pasal 24 Undang-undang No 32 Tahun 2004*). Skripsi Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (tahun 2005).

⁵ Dalam *Hikayat Patani* disebutkan istilah “Jawi” memang sudah lama dipakai oleh masyarakat Muslim-Malayu Patani untuk menunjuk identitas mereka. Namun, dalam konteks Patani yang disebut Jawi adalah dialek. Sedangkan dalam penulisannya disebut “*Sura jawi*” dan dalam bahasa lisan disebut “*Baso jawi*”. Dan “*orejawi*” untuk menunjuk atas perorangan. kemudian bahasa *Jawi* adalah salah satu bahasa yang digunakan oleh masyarakat Patani, Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, tulisan Jawi bermaksud tulisan yang menggunakan huruf Jawi. Manakala huruf Jawi bermaksud huruf Arab dengan beberapa huruf tambahan yang digunakan untuk menulis dalam bahasa Melayu.

umum tentang politik dan situasi umat Islam di Thailand serta dampak dikeluarkannya kebijakan pemerintahan tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori politik profetik untuk menganalisa dinamika pemerintahan Thailand memberi kebijakan terhadap masyarakat muslim Patani.

Politik Profetik

Istilah profetik merupakan derivasi dari kata *prophet*. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, profetik artinya bersifat kenabian⁶.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa tujuan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan material dalam duniawi yang tidak mungkin terpenuhi sendiri akan tetapi lebih dari itu untuk mempersiapkan diri untuk kehidupan yang sejahtera di akhirat. Maka kewajiban untuk memilih pemimpin tidak berdasarkan rasio berdasarkan keharusan agama⁷

Dalam ilmu sosial profetik yang dipopulerkan oleh Kuntowijoyo, tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial tetapi juga memberi petunjuk ke arah mana transformasi itu dilakukan, untuk apa, dan oleh siapa. Oleh karena itulah ilmu sosial profetik tidak sekedar merubah demi perubahan, tetapi merubah berdasarkan cita-cita etik dan profetik tertentu. Dalam kajian ilmu politik profetik terdapat tiga nilai penting yang dijadikan sebagai pijakan atau pijakan yang sekaligus menjadi unsur-unsur yang akan membentuk karakter paradigmatisnya,

⁶ DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, Kamus Besar Bahasa

⁷ Munawir Sjaizal, Islam dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran), cet. ke-1, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990),

yaitu; humanisasi, liberasi dan transendensi⁸, suatu cita-cita profetik yang tentang dalam Islam diturunkan ke dunia.

Dalam surat Ali- Imran ayat 110 yang berfirman Allah SWT.⁹

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله .

Humanisasi adalah memanusiakan manusia. Saat ini kita sedang mengalami proses *dehumanisasi* ketika kita menjadi objektivasu ketika kita berada di tengah-tengah mesin-mesin politik dan mesin-mesin pasar. Humanisasi sesuai dengan semangat liberalisme Barat. Hanya saja perlu segera ditambahkan, jika peradaban Barat lahir dan bertumpu pada humanism antroposentris, konsep humanism politik profetik berakar pada humanism teosentris, Karenanya, humsnisasi tidak dapat dipahami secara utuh tanpa memahami konsep transendensi (Tuhan) yang menjadi dasarnya (telah menciptanya).

Politik profetik mengusulkan humanisme teosentris sebagai ganti humanisme antroposentris untuk mengangkat kembali martabat manusia. Dengankonsep ini, manusia harus memusatkan diri pada Tuhan, tapi tujuannya adalah untuk kepentingan manusia (kemanusiaan) sendiri. Perkembangan peradaban manusia tidak lagi diukur dengan rasionalitas tapi transendensi. Humanisasi diperlukan karena masyarakat sedang berada dalam tiga keadaan akut yaitu dehumanisasi (obyektivasi teknologis, ekonomis, budaya dan Negara), agresivitas (agresivitas kolektif dan kriminalitas) dan loneliness (privatisasi, individuasi).

⁸ Muhammad Nur, "Rekonstruksi Epistemolgi Politik dari Humanistik Ke Profetik" dalam Jurnal Inright, Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Tahun 2010), hlm. 21.

⁹ Ali-Imran (3) : 110.

Liberasi adalah pembebasan dari kekejaman kemiskinan struktural, Keangkuhan teknologi, dan pemerasan kelimpahan¹⁰. Liberasi dalam Ilmu politik profetik sejalan dengan prinsip sosialisme (marxisme, komunisme, teori ketergantungan, teologi pembebasan). Hanya saja Ilmu politik profetik tidak hendak menjadikan liberasinya sebagai ideology sebagaimana komunisme. Liberasi Ilmu politik profetik adalah dalam konteks ilmu, yaitu ilmu yang didasari pada nilai-nilai luhur transcendental dan membebaskan dari nilai-nilai material. Jika nilai-nilai liberatif dalam teologi pembahasan dipahami dalam konteks ajaran teologi, maka nilai-nilai liberatif dalam politik profetik dipahami dan didudukkan dalam konteks ilmu social yang memiliki tanggung jawab profetik untuk membebaskan manusia dari kekejaman kemiskinan, pemerasan helimpahan, dominasi struktur yang menidas dan hegemoni kesadaran palsu.

Sasaran liberasi ada pada realitas empiris, sehingga liberasi sangat peka dengan persoalan penindasan atau dominasi struktural. Fenomena kemiskinan yang lahir dari ketimpangan ekonomi adalah bagian penting dari proyek liberasi. Liberasi menempatkan diri bukan pada lapangan moralitas kemanusiaan abstrah tapi pada realitas kemanusiaan empiris, bersifat kongkrit. Sikap menghindar dari yang kongkrit menuju abstrak adalah salah satu ciri berpikir berdasarkan mitos. Ilmu politik profetik menggariskan empat sasaran liberasi, yaitu sistem Pengetahuan, sistem sosial, sistem ekonomi dan sistem politik yang membelenggu manusia sehingga tidak dapat mengaktualisasikan dirinya sebagai makhluk yang merdeka dan mulia.

¹⁰ Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu (Epistimologi, Metodologi, dan Etika)*, edisiked:ua,(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 88.

Transendensi bertujuan untuk menambahkan dimensi transcendental¹¹ dalam kebudayaan. Kita harus membersihkan diri dengan mengingatkan kembali dimensi transcendental yang menjadi bagian sah dari fitrah kemusiaan. Sehingga kita bisa merasakan bahwa dunia ini merupakan rahmat Tuhan. Transendensi adalah dasar dari humanisasi dan liberasi. Transendensi memberi arah kemana dan untuk tujuang apa humanisasi dan liberasi itu dilakukan. Transendensi dalam ilmu politik profetik di samping berfungsi sebagai dasar nilai bagi praktis humanisasi dan liberasi, juga berfungsi sebagai kritik. Dengan kritik transendensi, kemajuan teknik dapat diarahkan untuk mengabdikan pada perkembangan manusia dan kemanusiaan, bukan pada kehancurannya. Melalui kritik transendensi, masyarakat akan dibebaskan dari kesadaran materialistik di mana posisi ekonomi seseorang menentukan kesadarannya, menuju kesadaran transcendental. Transendensi akan menjadi tolok ukur kemajuan dan kemunduran manusia.

Sejarah Islam juga mencatat bagaimana perubahan sistem pemilihan pemimpin. Sistem pemilihan yang terjadi pada masa *Khulafaurrasyidun* merupakan awal dari sistem kontrak sosial dan baiat dalam Islam, selain itu juga merupakan awal adanya sistem kesepakatan antara pemimpin dan masyarakat berdasarkan ketaatan terhadap Al-Qur'an, Sunnah (dan teladan para sahabat untuk penguasa pasca Abu Bakar). Kenyataan pada waktu itu adalah sudah berkembangnya system pemilihan berdasarkan tokoh-tokoh pusat dan utusan dari

¹¹ Kata *keq* transcend, yang arlinya kata transcendental diambil, berasal dari bahasa Latin *transcendere* yang artinya memanjat di/ke atas. Dalam Webster's New International Dictionary pengertian transcendental yang lebih relevan dalam konteks ini adalah "metafisis" dan "melampaui

beberapa daerah kekuasaan Islam, untuk melakukan musyawarah, sebagaimana terjadi ketika pengangkatan Ali sebagai khalifah¹².

Seorang yang dipilih menjadi imam atau kepala Negara memiliki syarat. Selain dari segi agama yang harus memenuhi syarat, terdapat budi pekerti yang Luhur, mengetahui sifat hidup manusiawi dan menjalankan tugas, dikenal baik oleh rakyat dan diterima oleh mereka. Selain itu seorang pemimpin harus mengedepankan aspek musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk bersama.

Akan tetapi system pemilihan pemimpin yang dijadikan pada masa *Khulafaurrasyidun* yang mengedepankan aspek musyawarah bertransformasi menjadi system tunjuk-menunjuk oleh penguasa untuk menunjuk siapa yang menjadi penggantinya menjadi khalifah. Pengangkatan Mu'awiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah menjadi pertanda runtuhnya sistem kekhilafahan yang digariskan Al-Qur'an serta dasar-dasar penerapan yang dibangun oleh Rasulullah dan dilaksanakan pada masa *Khulafaurasyidin*. Artinya sistem musyawarah yang mendasari pemilihan *Khalifah* tidak dijalankan oleh Mu'awiyah.

Dalam Islam tidak ada nas yang secara tegas menyebutkan sistem pemilihan pemimpin seperti apa dan bagaimana pelaksanaannya. Namun setidaknya Islam memberikan acuan dasar dalam melihat suatu permasalahan yaitu kaidah usul fikih sebagai berikut:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح¹³

¹² Khairudin Yujah Sawiy, *Perebutan kekuasaan Khalifah (Menyikap Dinamika dan Sejarah politik Kaum Sunni)*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2005), hlm. 9.

¹³ Dahlan Tarnin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kutubiyah Al-Khamsah)*, cet. ke-1, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm 176.

Kaitannya dengan perubahan pilkada langsung menjadi tidak langsung kita bisa menjadikan kaidah ini sebagai sudut pandang dalam melihat persoalan ini. Pilkada langsung lebih banyak menimbulkan mafsadah dari pada masalahnya. Sehingga perubahan pilkada langsung menjadi tidak langsung bertujuan untuk mengurangi mefsadat yang ditimbulkan selama pelaksanaan pilkada langsung.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam menjelaskan permasalahan di atas maka Penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu. Dalam hal ini penyusun mengambil obyek penelitian tentang dinamika bernegara masyarakat muslim Thailand selatan.

2. Definisi analisis

Adapun metode yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis data. Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti masuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun

demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.¹⁴

3. Teknik Pengumpulan dan analisis data

Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Metode wawancara interview melakukan wawancara, pengumpulan data dengan cara tanya jawab. Metode ini ditujukan kepada masyarakat patani tentang kebijakan pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memperoleh data tentang pelaksanaan dan perkembangan pembangunan dan pembinaan masyarakat muslim Patani.
- b. Observasi Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena yang diselidiki. Metode ini adalah untuk memperkuat data yang diperoleh dari wawancara. Jadi observasi untuk mendapatkan data tentang pembangunan dan pembinaan masyarakat muslim Patani.
- c. Data Sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka yang bersumber dari karya ilmiah, jurnal, buku-buku, ensiklopedi, artikel, ataupun media online.
- d. Analisis Data. Setelah data atau literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini dikumpulkan, maka data atau literatur tersebut diolah dan diseleksi kemudian diklasifikasikan secara sistematis dan logis barulah kemudian dianalisis secara komprehensif dengan menggunakan teori

¹⁴Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, Kualitatif dan r&d*, (Bandung:Alfabeta,cv), hlm.245.

politik profetik. Sehingga dapat dilihat bagaimana nilai-nilai profetik tersebut menjelaskan Tentang proses politik islam terhadap masyarakat Muslim Patani Dan respon masyarakat Patani terhadap pemerintahan Thailand . Dengan cara seperti ini. Diharapkan Penelitian memberikan gambaran yang lebih spesifik dalam melihat permasalahan obyek yang diteliti.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam memaparkan data-data dalam skripsi ini adalah pendekatan sosiologi politik. Pendekatan sosiologi digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama maupun tindakan atau interaksi sosial masyarakat. Sosiologi merupakan kajian yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan memahami berbagai fenomena-fenomena yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur kehidupan masyarakat.

G. Sistematika pembahasan

BAB I Untuk mempermudah dalam penyusunan Skripsi ini maka, sistematika Penyusunan skripsi ini terdiri lima bab diantaranya, Pertama adalah pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik dan metode penelitian.

BAB II berisi tentang konsep politik profetik yang membahas tentang humanisasi, liberasi dan transendensi menjadikan sebagai pisau analisis untuk

melihat perkembangan politik di Patani dan kebijakan pemerintah terhadap minoritas.

BAB III Membahas tentang keadaan umat Islam di Thailand Selatan. Penjelasan mencakup gambaran umum Patani, kondisi masyarakat Patani dan sistem sosial masyarakat Melayu Patani

BAB IV Analisis pandangan teori politik Islam terhadap perkembangan politik dan kebijakan politik terhadap umat Islam di Thailand Selatan.

BAB V Merupakan bab penutup dari penelitian ini yang mengutarakan tentang kesimpulan hasil penelitian ini, kata penutup dan dilengkapi dengan saran ,daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup Penutup penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka bisa diambil beberapa kesimpulan tentang berislam dan bernegara bagi muslim Patani perspektif politik propetik. perkembangan politik dan kebijakan Pemerintah terhadap wilayah-wilayah Patani dalam konteks sosial politik yang terjadi di Thailand Selatan diantaranya :

1. Perkembangan Politik pemerintahan Thailand terhadap warga Muslim Patani

Pada tahun 2001-an terjadi perubahan dalam system kebijakan politik Positif pemerintahan Thailand terhadap masyarakat muslim khususnya di Patani Thailand Selatan¹.

- a. Setiap masjid mendapatkan biaya dari pemerintah. Biaya tersebut mencakupi gaji bulanan bagi imam, khotib, bilal dan anggota ahli jawatan kuasa masjid.
- b. Setiap sekolah Tadika mendapatkan biaya dari pemerintah. Biaya tersebut mencakupi gaji bulanan bagi guru-guru Tadika dan yang bersangkutan dengan sekolah Tadika itu.
- c. Program menaikan Haji bagi warga Patani Setiap tahun pemerintah memberikan kouta untuk masyarakat Patani dapat menunaikan Haji secara gratis. Segala biaya akan ditanggung oleh pemerintah. Namun, tidak

¹ Wawancara Mahasiswa S2 UNY Yogyakarta Maroso Dolah

semua mendapatkan kouta tersebut. Adapun yang akan mendapat kesempatan itu hanya orang yang sesuai dengan mekanisme atau syarat-syarat yang ditentukan seperti orang miskin.

- d. Member benih binatang dan tanaman Salah satu program pemerintah untuk masyarakat dapat berdikari secara mandiri adalah dengan membagikan benih atau bibit binatang dan bibit tanaman. Di antaranya bibit bebek, kambing, sapi. Sementara bibit tanaman, di antaranya bibit kangkung, bibit kelapa, sawit dan sebagainya.
- e. Bank Islam ,dalam kemudahan bagi masyarakat muslim Patani.
- f. Anggaran projek bangunan, dalam kemudahan bagi masyarakat muslim Patani sepertinya dalam membangun toilet dan perpustakaan desa dan lain-lain lagi.
- g. Ganti rugi dalam bukti tidak kesalahan, seperti masyarakat tertembok oleh tentera Thailand dan anak gadis diperkosa,dan menyalak masyarakat muslim Patani dan sebagainya.

Pada tahun 1930-an terjadi perubahan dalam Sistem monthon tidak terjadi lagi. Monthon Pattani dibagi menjadi tiga provinsi, yaitu Pattani, Yala dan Narathiwat. Setiap muang (negeri) dijadikan changwat (provinsi) dan dipantau langsung oleh kerajaan pusat di Bangkok. Setelah revolusi tahun 1932, pemerintahan kerajaan Thai telah menegaskan pembentukan negara Thai moderen di bawah suatu kesatuan (unitary state). Revolusi budaya Phibun Songkhram sepanjang 1938-1944 M, telah menindas kumpulan minoritas Cina dan Melayu. Di wilayah Selatan Thai, hanya masyarakat Thai -

Buddha yang diangkat menjadi pegawai pemerintah, sedangkan kaum Melayu dan Cina yang menginginkan jabatan di pemerintahan harus mengganti nama mereka menjadi nama Thai.

Perkembangan situasi politik di Tanah Melayu pada era 1950-an sangat berbeda dengan era 1930-1940-an. Pada tahun 1930-1940-an, orang Melayu dan Inggris di tanah Melayu menunjukkan rasa simpati dan prihatin atas perjuangan kaum Melayu Pattani. Namun pada akhir tahun 1940-an memasuki awal tahun 1950-an, pembentukan Persekutuan Tanah Melayu dan ancaman pihak komunis telah berhasil mengalihkan perhatian masyarakat Malaya untuk menitikberatkan persoalan internal mereka. Jalinan kerjasama antara kerajaan Thailand dengan Inggris Malaya untuk menentang komunis telah mengubah kebijakan British Malay terhadap wilayah Melayu Pattani. Menjelang tahun 1980-an, muncul tiga kumpulan separatis yang beroperasi di kawasan perbatasan di Selatan Thailand.

Perkembangan era 1990-an merupakan masa pengukuhan hubungan dan keamanan antara Bangkok dan wilayah-wilayah Selatan Thailand. Kebijakan-kebijakan kerajaan Demokrat Thai yang memegang tampuk pemerintahan mencoba pendekatan baru dengan program pengintegrasian (inclusion), setelah sekian lama mengadopsi sistem exclusion. Peranan orang Melayu dalam politik kebangsaan Thai dalam tahun 1990-an mulai membaik. Terbukti pada periode ini, banyak tokoh-tokoh Islam yang memegang jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan kerajaan Thai.

Pertama, karena kebanyakan mereka (terutama yang tinggal di daerah *rural* seperti Pattani, Yala, Naratiwat) hanya dapat berbicara sedikit bahasa Thai atau tidak bisa sama sekali. Ini membuat mereka tidak mampu berkomunikasi dengan kaum Cina dan Thai Budha. *Kedua*, berdasarkan keyakinan agama, kaum Muslim Thailand secara militan menolak perilaku sosial yang berkaitan dengan kedua kelompok tersebut. Misalnya mereka tidak diperbolehkan menghadiri perayaan agama lain atau menikah dengan penganut agama lain. *Ketiga*, ketakutan Muslim Thailand bahwa interaksi dengan Thai Budhis akan mengakibatkan anak-anak mereka menerima budaya Thai, melalui proses asimilasi dan berakibat mengikis tradisi Melayu serta nilai-nilai ajaran agama Islam.

B. Saran

Persoalan mengenai perkembangan politik masyarakat muslim Patani sangat menarik untuk dikaji karena masyarakat Patani memiliki tipologi yang unik dan beragam. Perubahan sosial dan konstelasi politik tentunya memiliki andil bagi interaksi politik masyarakat. Karena bagaimanapun juga dunia politik sangatlah dinamis. Disatu sisi, penelitian mengenai kebijakan politik pemerintah terhadap masyarakat Patani.

Sehingga pada akhirnya penelitian ini bukanlah akhir untuk menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perkembangan politik dan kebijakan pemerintah terhadap muslim Patani. Masih terbuka interpretasi bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini merupakan langkah awal untuk menjawab persoalan-persoalan mengenai dinamika politik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Artikel

- Aek Tangsupvattana, Ora-orn Poocharoen, *Problem of the Three Southern Border Provinces: Policy Recommendation*, (Bangkok: Chulalongkon University, 2009),.
- Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban Di Kawasan Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Ahmad Fathy, *Pengantar Sejarah Patani*, (Alor Star: Pustaka Darussalam, 1994).
- Ahmad Hasan Zaiyat, *Tarikh Adab Arabi*, (Lebanon: Dar Al-Ma'arif, 2001).
- Ahmad Omar Capakiya, *Politik dan Perjuangan Masyarakat Islam Selatan Thailand 1909-2002*, (Kuala Lumpur: UKM, 2002).
- Anthony Giddens (Ed.), *Positivism and Sociology*, (London: Heinemann, 1975).
- Aphornsuvan, *History and Politics of the Muslim in Thailand*.
- A. Suryana Sudrajat, Cahaya Nusantara, *Patani Negeri Selalu Resah*, No. 8, 26-04-2007.
- Astir Syokri, *The Muslims: Some Aspects of Minority Integration*, Pacific Affair, Vol. xliii, No. 4, 1970-1971.
- Betty R. Soharf, *Kajian Sosiologi Agama*, terj. Machnun Husein, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995).
- Bun Krom Dongbangsathan, *The Last War*, t.t., hlm. 5. Lihat juga. Samai Carunchang, *Yon Roi Muslim Siam*, (Bangkok: Mulnithi Phua Pathana Yauwacun Su Saphawa Phunam, 2012).
- Carunchang, *Yon Roi Muslim Siam*, (Bangkok: Mulnithi Phua Pathana Yauwacun Su Saphawa Phunam, 2012).
- Dahlan Tarnin, *Kaidah-Kaidah Hukum Istam* (Kuttyah Al-Khamsah), cet.ke-1, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010).
- Ensiklopedi Tematik Dunia Islam, *Asia Tenggara*, (Jakarta: Ichtiar Vanve).

- F. Budi Hardiman, *Kritik Ideologi, Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*, cet. 2, (Yogyakarta: Kanisius, 1990).
- Farid Mat Zim, *Minority Muslim di Thailand*, (Selangor: Minda Bandar Baru Bangi, 1998).
- Hans H. Indorf, *Impediments to Regionalism In Southeast Asia: Bilateral Constraints Among ASEAN Member States*, Singapore: ISEAS, 1984.
- Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara*, (Bandung: Nusa Media, 2011).
- Herry Nurdi, *Perjuangan Muslim Patani Sejarah Panjang Penindasan dan Cita-cita Perdamaian di Patani Darussalam*, (Kuala Lumpur: Alam Raya Enterprise SDN BHD, 2010).
- Ibrahim Syukri, *Sejarah Kerajaan Melayu Patani*, (Kelantan: Majlis Agama Islam Kelantan, 1985).
- Ismael Che Daud, *Tokoh-tokoh Ulama Semenanjung Melayu*, (Kuala Lumpur: Perniagaan Rampai Utama, 1988).
- Kementerian Kebudayaan Nasional, *Karn Serm Sarng Watthanatham Prachatipai Nai Sangkum Thai*, (Bangkok: Kementerian Kebudayaan Nasional, 2009).
- Khairudin Yujah Sawiy, *Perebutan kekuasaan Khalifah (Menyikap Dinamika dan Sejarah politik Kaum Sunni)*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2005).
- Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu (Epistimologi, Metoclogologi, dan Etika)*, edisiked:ua, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006).
- Lihat, Astri Suhrke (1975), "Irredentism Contained; The Thai-Muslim Case" *Comparative Politics* 7(2).
- L. Laeyendecker, *Tata, Perubahan dan Ketimpangan: Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi*, (Orde, Verandering, Ogelijkheid: Een Inleiding in De Geschiedenis van De Sociologie), alih bahasa Sumekto, (Jakarta: Gramedia, 1983).
- M.Ali Kettani, *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- M. Ali Kettani, *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 2003.

- Malise Ruthven, Azim Nanji, *Historical Atlas of Islam*, (Massachu Setts: Harvard University Press Cambridge, 2004).
- Mohd.Zambari A. Malek, *Umat Islam Patani*.
- Mohd. Zambari A. Malek. Harimau Malaya: Biografi Tengku Mahmood Mahyiddeen.
- Mujahirin Thohir, *Orang Islam Jawa Pesisiran*, (Semarang: Fasindo Press, 2006).
- Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 tahun*, (Jakarta: Para Madina, 1995).
- Munawir Sjazali, *Islam dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, cet. ke-(Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990),
- Nazarudin Yahya (2004), *Kemelut Politik Wilayah Selatan Thailand 2004: Suatu Analisa*.
- Omar Farouk Bajunid, “ Islam, Nationalism and The Thai State”, dlam. Wattana Sugunnasil (ed). *Dynamic Diversity in Southern Thailand*, Chiang Mai; Silkworm Books, 2005.
- Sheppard Mubin, *Taman Indera: Malay Decorative Arts and Passtimes*, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1972).
- SOBT, *Phean Patthana Ha Changwad Chaidea Phaktai*, Yala: 1996.
- Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, Kualitatif dan r&d*, (Bandung: Alfabeta,cv).
- Sudirman Tebba (Ed.), *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*, (Bandung: Mizan Pustaka, 1993).
- Surin Pitsuwan, *Islam di Muangthai*.
- Taufik Abdullah, Sharon Siddique, *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: LP3ES, 1988).
- Thanet Aphornsuvan, *History and Politics of the Muslim in Thailand*, (Bangkok: Thammasat University, 2003).
- Tim Penyusun Studi Islam, *Pengantar Studi Islam*.

B. Internet

<http://pmi-sumedang.blogspot.co.id/2012/02/sedikit-sejarah-pattani.html>

<http://estehejo.blogspot.co.id/2016/06/sejarah-pergolakan-politik-umat-islam.html>

<http://syamina.org/syamina36-PATANI-BUKAN-PATTANI-PERJUANGAN-PANJANG-MUSLIM-MELAYU-DI-THAILAND-SELATAN.html>



LAMPIRAN

Lampiran I

NO	HALAMAN	BAB	FN	TERJEMAHAN
١	١٢	BAB I	110	Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.

Lampiran II

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana tanggapan anda terhadap politik pemerintah Thailand ?
2. Apakah konteks hak minoritas Muslim dengan pemerintah?
3. Bagaimana tanggapan anda tentang pendidikan secara khusus di Patani ?
4. Apakah konflik di Patani ?
5. Bagaimana respon masyarakat muslim terhadap kebijakan pemerintah Thailand ?
6. Berapa faktornya yang terjadi konflik ?

Lampiran III

HASIL WAWANCARA

NO	NAMA	STATUS	HASIL WAWANCARA
1	Ni'abdulaziz Wajik	Deputy Chief Executive of the SAO	Dalam konteks hak-hak kelompok minoritas di dalam negara nasional, bahwa baik minoritas pribumi atau native maupun imigran harus diberi hak yang sama dengan mayoritas dalam identitas nasional. Keduanya memiliki hak sederajat dalam konstitusi maupun sosial-ekonomi-politik. Namun mereka dibedakan bahwa, imigran tidak memiliki hak untuk menuntut <i>self-government</i>, berbeda dengan minoritas pribumi. Menurut Kymlicka, minoritas pribumi seharusnya memiliki hak untuk menuntut atau diberi <i>self-government</i>. Dalam konteks berlarutnya konflik dan kekerasan di Patani dengan Thailand, dengan demikian, bisa dilihat adanya konsep nasionalisme yang berbasis pada negara-bangsa di satu pihak dan tidak diberikannya hak <i>self-government</i> kepada kelompok minoritas tersebut di lain pihak. Selanjutnya, identitas nasional (<i>national identity</i>) biasa dikatakan sebagai suatu fenomena modern yang membentuk solidaritas dari berbagai elemen suatu masyarakat di dalam kawasan teritorial tertentu yang kemudian menjadi bangsa atau negara-bangsa (<i>nation-state</i>). Identitas nasional adalah sesuatu yang mencakup hampir seluruh dimensi kehidupan sehingga ia menjadi suatu kekuatan yang eksklusif dan inklusif sekaligus. Ia

			bukan hanya dalam aspek politik, ekonomi tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari atau budaya.
2	Nuriya Salae	Warga Patani	Warga Patani melihat kebijakan pemerintah sangat bertindas, dengan mengeluarkan undang-undang darurat militer, membuat konflik semakin panas dan banyak warga patani di culik dan di bunuh.
3	Faisol Hama	Mahasiswa S2 UIN Suka Yogyakarta	Dalam konflik yang terjadi dapat kita ketemui bahwa konflik umumnya berakar pada latar-belakang politik, maupun berasal dari kebijakan yang ketidakadilan. Di sisi lain, ketidak-imbangan alokasi sumber daya telah mendorong rasa ketidakadilan yang berujung pada konflik. Sementara, isu agama, etnis, sejarah maupun separatism, merupakan faktor pemicu yang membungkuskan konflik terus berkepanjangan. Dalam situasi konflik, hampir seluruh fungsi-fungsi pemerintah tidak dapat berjalan efektif. Semenjak 2004 cetusan manifesto politik pada era revolusi di Patani dengan secara gerilya, dalam situasi dan kondisi konflik lebih kurang satu dekade dengan tanpa titik temu untuk berakhir. Walaupun proses dialog perdamaian antara pemerintah Thailand dengan BRN (Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani) sering beberapa kali numun tidak begitu nampaknya resolusi yang paling terbaik dalam penyelesaian masalah konflik. Justru dampak dari kekerasan bersenjata semakin kuat, hingga kebelakangi ini dapat mengurangi dan hendari sasaran mangsa terkorban bukan kelompok sesama angkatan bersenjata, akan

			tetapi rasa ketakutan bagi penduduk di zona konflik dan seluruh warganegara masih berharap untuk berhenti segala operasi kekerasan dan aktivitas bersenjata yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
4	H.Zakariya H.Abdullah	Kyai Pesantren (Pondok Jatik Wilayah Jala)	Bahawa nilai-nilai Islam menentukan identitas melayu Patani' sebagaimana dikatakan oleh orang melayu patani "Mempertahankan budaya melayu berarti mempertahankan agama islam " Pendidikan awal bagi warga muslim patani dengan pendidikan surau atau pesantren (pondok) seperti pengajian Al-quran, kitab lama dan lain-lain. Penggan warga muslim patani bagi lelaki atau perempuan tidak izin menikah sebelum tamat pengajian.
5	Abdulfatah Wesalae	Warga Patani	Kebijakan Pemerintah dalam melemahkan segenap aspek agar tidak pemberontak, kemerdekaan merupakan tujuan utama bagi pemberontak dalam perjuangan mereka kerana sejarah sudah menjelaskan bahwa negeri Patani Darussalam di jajah oleh Kerajaan Thailand. Isu kemerdekaan sudah lama di perjuangangkan namun mereka masih lagi mengalami kekalahan, dan ramai terkorban kedua belah pihak.
6	Abdulah H.Ahmad	Mahasiswa S1 UIN Suka Yogyakarta	Ada tiga faktor yang membuat terjadinya mobilisasi kultural berhadapan dengan mayoritas dan pemerintah pusat, yaitu berkaitan dengan kemajuan dan perubahan ekonomi; adanya ketidak-sederajatan dalam kesempatan pendidikan, lapangan kerja, dan ekspresi; serta meningkatnya kelas menengah yang bisa merumuskan kepentingan bagi mereka. Bahwa setidaknya ada tiga faktor yang

			menjadi akar penyebab gerakan minoritas Muslim atas pemerintah pusat dan mayoritas. <i>Pertama</i> , ketidaksensitifan pemerintah pusat terhadap keprihatian lokal, kemiskinan, ketertinggalan pendidikan, dan langkanya lapangan kerja di satu pihak dan ke-abai-an atau ketidakpedulian regional atau pemerintah dan masyarakat di sekitarnya di pihak lain. <i>Kedua</i> , represi militer dan penyeragaman identitas; dan <i>Ketiga</i> , kekuatan dorongan Islam.
7	Maroso Doloh	Mahasiswa S2 UNY Yogyakarta	1).Setiap masjid mendapatkan biaya dari pemerintah. Biaya tersebut mencakupi gaji bulanan bagi imam, khotib, bilal dan anggota ahli jawatan kuasa masjid. 2). Setiap sekolah Tadika mendapatkan biaya dari pemerintah. Biaya tersebut mencakupi gaji bulanan bagi guru-guru Tadika dan yang bersangkutan dengan sekolah Tadika itu. 3).Program menaikan Haji bagi warga Patani Setiap tahun pemerintah memberikan kouta untuk masyarakat Patani dapat menunaikan Haji secara gratis. Segala biaya akan ditanggung oleh pemerintah. Namun, tidak semua mendapatkan kouta tersebut. Adapun yang akan mendapat kesempatan itu hanya orang yang sesuai dengan mekanisme atau syarat-syarat yang ditentukan seperti orang miskin. 4).Member benih binatang dan tanaman Salah satu program pemerintah untuk masyarakat dapat berdikari secara mandiri adalah dengan membagikan benih atau bibit binatang dan bibit tanaman. Di antaranya bibit bebek, kambing, sapi. Sementara bibit tanaman, di antaranya bibit kangkung, bibit kelapa, sawit dan sebagainya. 5).Bank Islam ,dalam kemudahan bagi masyarakat muslim Patani. 6).Anggaran projek bangunan, dalam

			kemudahan bagi masyarakat muslim Patani sepertinya dalam membangun toilet dan perpustakaan desa dan lain-lain lagi. 7).Ganti rugi dalam bukti tidak kesalahan, seperti masyarakat tertembok oleh tentera Thailand dan anak gadis diperkosa,dan menyalah masyarakat muslim Patani dan sebagainya.
--	--	--	--



Lampiran IV

CURRICULUM VITAE



A. Identitas Dari

Nama : Mr.Niaripen Wayeekao
Tempat/ Tanggal Lahir : Thailand, 26 Juni 1993
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : 231 Tempat 8 T. Bannangsta A. Bannangsta, Ch.
Yala 95130 Thailand
Email : Niaripen.14@gmail.com

B. Nama Orang Tua dan Saudara

Ayah : Thoha Wayeekao
Ibu : Aesoh Salae
Saudara : 1. Niabdulaziz Wajik
2. Nimat Wajik
3. Ni'rohalim Wayeekao
4. Nirosalee Wayeekao
5. Niabdulroning Wayeekao
6. Nisulaiman Wayeekao
Alamat Thailand : 231 Tempat 8 T.Bannangsta A.Bannangsta, Ch.
Yala 95130 Thailand
Alamat Indonesia : Jl. Ngorojo 15 RT.07 RW.03 Gowok CT. Depok
Sleman Yogyakarta

C. Riwayat Catatan Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar Dam Banglang : Tahun 2000-2006
2. SMP Muhammadiyah : Tahun 2006-2009
3. SMA Muhammadiyah : Tahun 2009-2012
4. UIN Sunan Kalijaga : Tahun 2012-Sekarang.

D. Pengalaman Organisasi

1. Persatuan Mahasiswa Islam Patani Selatan Thailand di Indonesia (PMIPTI)
➤ Anggota : 2012
➤ Ketua D.Olahraga dan Kebudayaan : 2013
➤ Sekretaris PMIPTI : 2014
2. Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
➤ Anggota : 2012

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/11.07 2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 5 Mei 2016

Kepada

Yth. Bupati bannang-sta di Thailand selatan

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

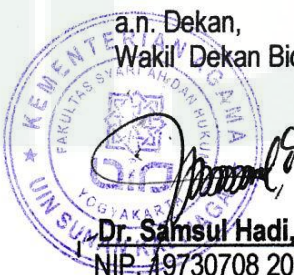
No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Mr.Niaripen wayeekao	12370039	Js

Untuk mengadakan penelitian di bannang-sta Yala Thailand Selatan guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "BERISLAM DAN BERNEGARA BAGI MUSLIM DI PATANI PERSPEKTIF POLITIK PROPETIK"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Dr. Samsul Hadi, M.Ag

NIP. 19730708 200003 1 003 1

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



เลขที่ ๐๔๕๓/๒๕๕๙

ที่ว่าการอำเภอบันนังสตา
ถนนสุขยางค์ ยล ๙๕๑๓๐

หนังสือรับรองการทำวิจัย

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า นายนิอาร์เพ็ญ วายีเกา เลขประจำตัวนักศึกษา ๑๒๓๗๐๐๓๙ วิชาเอกการเมืองอิสลาม มหาวิทยาลัยอิสลามรัฐชุนันกาเลียจากา คณะชารีอะห์ และนิติศาสตร์ กระทรวงการศาสนา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่อยู่ ถนนมารชาดา อาติวุจิปโต ยอร์กยาการ์ตา อินโดนีเซีย ได้มาเก็บข้อมูล เพื่อทำการวิจัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงและการเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมในภาคใต้ของประเทศไทยในมุมมองของ สังคมวิทยาอิสลาม” จริง

จึงออกหนังสือรับรองให้ไว้เป็นหลักฐาน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ลงชื่อ

(นายदनัยณัฐ แหะหมั่น)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) รักษาราชการแทน

นายอำเภอบันนังสตา

Nomor.0497/2559



Di Kabupaten Bannangsta

Jl. Suyang YL 95130

SURAT REKOMENDASI IJIN PENELITIAN

Surat ini disediakan untuk memastikan bahwa saudara Mr. Niaripen Wayeekao NIM. 12370039 Prodi Siyasa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Indonesia, diizinkan untuk mengumpulkan data untuk melakukan penelitian di wilayah Patani Thailand Selatan. Dengan Teman Berislam Dan Bernegara bagi Muslim di Patani Perspektif Politik Propetik.

“ Sehingga mengeluarkan Surat Rekomendasi Ijin Penelitian untuk bukti Penelitian”

Kabupaten Bannangsta, 29 Juni 2016

- ลายมือชื่อ -

(Mr.Danainat Lehman)
Chief Administrator of the PAO
Bannangsta